

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintah daerah merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintah yang sumber pengesahannya berasal dari masyarakat. Kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada penyelenggara pemerintah harus diimbangi dengan kinerja yang baik, sehingga pelayanan dapat ditingkatkan secara efektif dan menyentuh pada masyarakat. Untuk pemerintah daerah, penilaian kinerja menjadi sorotan banyak pihak terlebih dengan adanya otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat seperti yang diamanatkan dalam UU nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Tuntutan agar instansi pemerintah terutama bagi pemerintah daerah untuk dapat mengukur kinerja semakin besar dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Daerah.

Kinerja memang telah menjadi sorotan penting dalam seluruh tahapan penyelenggaraan baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Kinerja pemerintah saat ini sering dinilai tidak produktif, tidak efisien, rendah kualitas, miskin inovasi dan kreativitas. Dalam hal evaluasi kinerja saja hingga saat ini belum tersedia payung hukum yang menjadi dasar dan pedoman penyusunan dokumen evaluasi kinerja pemerintah daerah. Selain itu minimnya jumlah dan kualitas pengelolaan kebijakan pemerintah daerah menjadi salah satu penyebab kurang berkualitasnya produk

kebijakan yang dihasilkan. Sehingga peningkatan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat sebagai salah satu visi/misi dan tujuan pemerintah daerah akan sulit tercapai (Ira Halidayanti, 2014).

Kinerja instansi pemerintah merupakan gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan (BPPK Depkeu : 2014).

Kinerja instansi pemerintah didefinisikan sebagai hasil kerja seorang pekerja, sebuah proses manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan, dimana hasil kerja tersebut harus dapat ditunjukkan buktinya secara konkrit dan dapat diukur (dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan). (Sedarmayanti, 2011 : 260).

Kinerja instansi pemerintah adalah hasil atau tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah dalam menjalankan tugasnya secara keseluruhan sesuai dengan tujuan yang sebelumnya telah direncanakan dalam periode tertentu. Penentuan tujuan adalah proses menentukan tingkat performa yang spesifik. Tujuan berfungsi sebagai motivator yang menyebabkan orang-orang membandingkan kapasitas mereka saat ini yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang spesifik dan sulit dengan umpan balik akan menghasilkan kinerja yang lebih tinggi. Artinya bahwa tujuan yang spesifik akan meningkatkan kinerja, tujuan yang sulit ketika diterima akan menghasilkan kinerja yang lebih tinggi dibanding tujuan yang mudah dan umpan balik akan menghasilkan kinerja yang lebih tinggi dari pada tanpa umpan balik (Sunyoto dan Burhanuddin, 2011 : 34).

Fenomena masalah kinerja instansi di dalam pemerintah merupakan hal yang rutin terjadi. Seperti kasus Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang mendapat nilai C terkait akuntabilitas kerja dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) untuk tahun 2015. Raihan nilai tersebut menunjukkan masih kurangnya pelayanan pemerintah kepada masyarakat akibat kerja PNS-nya yang rendah. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diminta untuk bekerja keras lagi guna mendapatkan nilai yang lebih baik di tahun mendatang. Penilaian tersebut dilihat dari Laporan Kinerja Pegawai (LAKIP) dengan sejumlah indikatornya, mulai dari kinerja pegawai, pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan tahun anggaran sampai dengan evaluasi kegiatan. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bandung Barat masih memiliki kekurangan dalam melaksanakan program kegiatan di tahun anggaran. Kekurangan tersebut, mulai dari merumuskan tujuan, sasaran, merumuskan kunci keberhasilan, menentukan indikator untuk mencapai tujuan keberhasilan dan evaluasi kegiatan. Kelemahan lainnya terkait penentuan target program jangka pendek dan jangka panjang yang kaitannya dengan anggaran atinya bukan hanya melaksanakan program dan juga menghabiskan anggaran akan tetapi harus ada keberhasilan dan bukti nyata di tengah masyarakat setelah program itu dijalankan. (Holid Nurjamila, 2016).

Berdasarkan fenomena di atas, kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Barat atas melaksanakan program kegiatan di tahun anggaran masih belum maksimal. Fenomena tersebut bertentangan dengan variabel kinerja instansi pemerintah dalam dimensi produktivitas.

Fenomena lainnya yaitu pada tahun 2015 LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara (Penjara) Jawa Barat meminta Bupati Kab. Bandung Barat, Abu Bakar, bertanggung jawab atas 10 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dinilai bermasalah. Kepala Bidang Investigasi LSM Penjara Jawa Barat meminta Bupati Kab. Bandung Barat harus menindak anak buahnya di 10 SKPD yang dinilai bermasalah. Sejumlah SKPD tersebut, yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Bina Marga, Dinas Kesehatan, Dinas Perairan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Cipta Karya, Dinas Perhubungan, Sekretaris Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, serta DPRD dan Sekertariat DPRD Kabupaten Bandung Barat. Disebutkan bahwa, masalah di Dinas Pendidikan diantaranya soal tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan profesi yang disalurkan ke PNS SD yang tidak sesuai dengan kriteria pada 2014 lalu. Selain itu, adanya rekayasa lelang pada sejumlah proyek di Dinas Pendidikan pada 2014. Di Dinas Kesehatan, masalah kelebihan pembayaran pada proyek pengadaan alat kesehatan tahun 2014 serta rekayasa dalam pelelangan di layanan pengadaan secara elektronik Kabupaten Bandung Barat. Sementara di Dinas Bina Marga, juga terdapat indikasi korupsi belanja modal konstruksi. (Dodo Suhendar, 2015).

Berdasarkan fenomena di atas, kinerja instansi pemerintah di Kab. Bandung Barat masih belum optimal dalam menjalankan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau tidak sesuai dengan kebijakan organisasi. Fenomena tersebut bertentangan dengan variabel kinerja instansi pemerintah dalam dimensi responsibilitas.

Kinerja instansi pemerintah idealnya dapat mengukur tingkat pelayanan publik dalam rangka mencapai hasil yang diharapkan, meningkatkan kualitas layanan,

mengembangkan pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan melaksanakan kegiatan administrasi dengan benar. (Sudarmanto, 2014).

Keberhasilan kinerja instansi pemerintah daerah juga tidak terlepas dari peran sistem pengendalian intern pemerintah. Sistem pengendalian intern pemerintah meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran - ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keterandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan dipatuhinya kebijakan pimpinan. Penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efektif dan efisien. Untuk mewujudkannya dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dapat mencapai tujuan. (Chici Claraini, 2017).

Sistem pengendalian ini dikenal sebagai sistem pengendalian intern pemerintah, namun pada dasarnya proses implementasi dari sistem pengendalian ini masih pada tahap sosialisasi dan penyiapan pedoman pelaksanaan. Sistem pengendalian intern adalah proses yang dirancang untuk menyediakan jaminan yang layak mengenai pencapaian dari sasaran manajemen dalam kategori keandalan laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi dari operasional dan pemenuhan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang biasa diterapkan. (PP No. 60 tahun 2008).

Pengendalian intern merupakan salah satu kunci utama sebuah organisasi untuk mencapai tujuannya, baik itu organisasi swasta yang berorientasi pada laba maupun organisasi pemerintah yang bersifat nirlaba. Pengendalian intern menjadi sangat penting

bagi suatu organisasi karena dengan pengendalian intern yang baik, maka kinerja organisasi tersebut juga akan baik atau dengan kata lain kualitas pengendalian intern yang baik akan meningkatkan kinerja para anggota organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pentingnya pengendalian intern dalam mencapai tujuan organisasi menyatakan bahwa kualitas pengendalian intern yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan teknologi informasi akan mampu membantu suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. (Arfianti, 2011).

Dengan adanya pengendalian intern maka seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisiensi untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Dadang, 2014).

Salah satu faktor untuk menciptakan nilai di suatu pemerintahan adalah komitmen yang dibuat oleh semua komponen-komponen individual dalam menjalankan operasional pemerintahan. Komitmen tersebut dapat tercipta apabila pegawai sadar akan hak dan kewajibannya dalam pemerintahan tanpa melihat jabatan dan kedudukannya, karena pencapaian kinerja pemerintah daerah merupakan hasil kerja sama dari semua pegawai. (Yuni, 2016)

Komitmen organisasi adalah suatu keadaan di mana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu beserta tujuannya dan berniat memelihara keanggotaan dalam organisasi itu. (Cepi Triatna 2015:120)

Komitmen yang tinggi menjadi individu lebih memperhatikan organisasi dari pada kepentingan pribadi dan berusaha menjadikan organisasi menjadi lebih baik. Komitmen organisasi yang rendah akan membuat individu untuk berbuat untuk kepentingan pribadinya. (Angel dan Perry dalam Kurniawan, 2013).

Demi mewujudkan penyelenggaraan kinerja instansi pemerintah yang baik maka pemerintah mencoba mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau dikenal dengan istilah *good government governance*. Terselenggaranya *good government governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). (Sedarmayanti, 2012:10).

Good government governance merupakan wujud dari penerimaan akan pentingnya suatu perangkat peraturan atau tata kelola yang baik untuk mengatur hubungan, fungsi dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis maupun pelayanan publik. Melaksanakan *good government governance* yang baik tentu kinerja instansi pemerintah akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan. Hal ini dapat diberikan kesimpulan bahwa apabila pelaksanaan *good government governance* ditingkatkan maka otomatis dapat meningkatkan kinerja instansi pemerintah. (Arief, 2016).

Penelitian ini merupakan penggabungan dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Nur Azlina dengan judul “Pengaruh *Good Government Governance* dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi di Kabupaten Pelalawan” dan Gustika Yolanda Putri dengan judul “Pengaruh Komitmen Organisasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Survey pada SKPD di Kota Padang).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul : **“PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH, KOMITMEN ORGANISASI DAN *GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT (Survey Pada Dinas-Dinas Di Wilayah Kabupaten Bandung Barat)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka permasalahan yang dapat diidentifikasi dan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini agar dapat mencapai sasaran dalam penyusunan, penulisan membatasi masalah-masalah yang akan dikemukakan sebagai berikut :

1. Bagaimana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat .
2. Bagaimana Komitmen Organisasi pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.

3. Bagaimana *Good Government Governance* pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
4. Bagaimana Kinerja Instansi pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
5. Seberapa besar pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Komitmen Organisasi dan *Good Government Governance* terhadap Kinerja Instansi pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat secara parsial dan simultan.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam memenuhi ujian sarjana ekonomi program studi akuntansi. Dan untuk mengumpulkan data, menganalisis, mengetahui, dan menjelaskan mengenai pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah, komitmen organisasi dan *good government governance* terhadap kinerja instansi pemerintah.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Untuk mengetahui Komitmen Organisasi pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.

3. Untuk mengetahui *Good Government Governance* pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
4. Untuk mengetahui Kinerja Instansi pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Komitmen Organisasi dan *Good Government Governance* terhadap Kinerja Instansi pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat secara parsial dan simultan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan guna memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain :

1.4.1 Kegunaan Teoritis/Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan dan kemajuan di bidang akuntansi.

1.4.2 Kegunaan Praktis/Empiris

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis, mengenai pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah, komitmen organisasi dan *good government governance* terhadap kinerja instansi pemerintah.

2. Bagi Perusahaan/Instansi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengetahui seberapa besar pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah, komitmen organisasi dan *good government governance* terhadap kinerja instansi pemerintah.

3. Bagi Instansi Pendidikan

Dapat digunakan sebagai alat pertimbangan, acuan dan referensi tambahan untuk penelitian-penelitian selanjutnya mengenai pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah, komitmen organisasi dan *good government governance* terhadap kinerja instansi pemerintah dengan mengacu pada penelitian yang lebih baik.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada instansi pemerintah Kab. Bandung Barat Jl. Raya Padalarang - Cisarua Km. 2 Desa. Mekarsari Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat 40552 Jawa Barat – Indonesia. Waktu penelitian dimulai pada bulan Maret sampai dengan selesai.